

PERSPEKTIF KRITIS JAMAL KHASHOGGI DALAM ARTIKEL WASHINGTON POST TERHADAP KEBIJAKAN ARAB SAUDI

Rahmat Firnanda

Ar Raniry State of Islamic University, Aceh Indonesia

Email: firmand@gmail.com

Abstrak

Sebuah perspektif kritis dari Jamal Khashoggi terhadap kebijakan Arab Saudi merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang Khashoggi harapkan dapat di implementasikan di tanah kelahirannya Saudi. Perselisihan antara pemerintahan Saudi dan Khashoggi dalam mendefinisikan narasi terhadap sejumlah kebijakan Saudi menjadi sebab kepergiannya ke Washington dan mulai menyuarakan kritik kritik dan opini opininya melalui tulisan artikel di surat kabar Washington Post dari tahun 2017 sampai 2018. Pokok permasalahan yang disentuhnya antara lain tentang kebebasan berekspresi, perang di Yaman, Korupsi, dan kelompok Ikhwanul Muslimin. Penelitian ini mencoba untuk memahami permasalahan yang dihadapi oleh pemerintahan Saudi yang ingin Khashoggi kritisi dalam setiap langkah yang diambil Saudi baik pada kebijakan dalam negeri maupun kebijakan luar negeri melalui penelitian kualitatif. Penelitian ini mencoba menjawab isu isu besar yang Khashoggi coba uraikan dalam artikel-artikel yang dituliskannya di Washington Post. Dapat ditemukan ada banyak permasalahan khusus dimana Khashoggi mempunyai opini yang berbeda terhadap penyelesaian yang diterapkan Saudi di bawah Muhammad bin Salman. Reformasi yang dijanjikan Saudi hanya diterapkan pada aspek infrastruktur pembangunan. Ironisnya pembangunan ini tidak diiringi dengan reformasi dalam aspek kebebasan berekspresi, kebebasan berbicara, dan hak hak politik untuk rakyat Saudi sebagai bagian kesetaraan di mata hukum.

Keywords: *Khashoggi; Saudi; Kebijakan; Jurnalistik*

Abstract

A critical perspective of Jamal Khashoggi towards the Saudi Arabia policy is part of the free expression which Khashoggi expected can be implemented in his homeland Saudi. The dispute in defining a narration between Saudi government and Khashoggi toward to some policy Saudi took caused of his departure to Washington DC and started to voice his critics and opinions by writing articles in Washington Post from 2017 until 2018. The issues which he touched were about free expression, Yemen war,

corruption, and Ikhwanul Muslimin. This paper attempts to understand the problem Saudi faces which he want to criticize on Saudi moves whether it is domestic or foreign policy through qualitative narrative. This paper attempts to answer what are the big issues Khashoggi try to deliver in Washington Post articles he wrote. It can be found there are many detail issues which Khashoggi has difference opinion to what Saudi has done under MBS. The reform which Saudi promise only applied on infrastructure. Ironically it is not followed by reform in free expression, free speech and political rights for Saudi citizen as equality before the law.

Keywords: Khashoggi; Saudi; Policy; Journalism

A. PENDAHULUAN

Dalam dunia jurnalistik, kebebasan dalam mengutarakan ide, gagasan, dan visi merupakan hak paling mendasar yang harus dimiliki oleh setiap orang khususnya jurnalis maupun aktivis yang sehari harinya berkecimpung dalam menyampaikan pemberitaan dan perkembangan informasi dunia melalui media tulis seperti koran, majalah dan sejenisnya. Mereka sepatutnya dilindungi dari segala bentuk ancaman yang dapat mengikis integritas dan objektivitas kinerja menurut etika jurnalistik seperti yang tertuang dalam Article 3 poin pertama¹. Dalam hal ini urgensi untuk memberikan perlindungan kepada jurnalis sebagai subjek yang mewakili profesi jurnalistik karena dunia jurnalistik menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam sebuah sistem demokrasi². Namun pada tanggal 2 Oktober di tahun 2018, dunia dikejutkan oleh menghilangnya seorang jurnalis terkemuka, Jamal Khashoggi di dalam Kantor kedutaan besar Arab Saudi di Istanbul, Turki. Khashoggi yang saat itu berstatus sebagai pelarian politik dari kebijakan Arab Saudi yang melakukan penangkapan sistematis terhadap para

¹ Phillippe Le Ruth and Anthony Bellanger, "International Federation of Journalists, International Press Centre," Brussels, accessed March 3, 2021, https://www.ifj.org/fileadmin/user_upload/Draft_Convention_Journalists_E.pdf

² John J. Pauly, "Is Journalism Interested in Resolution, or Only in Conflict?", *Marquette Law Review* 93 Issue 1: 13, accessed February 3, 2021, http://scholarship.law.marquette.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1004&context=mulr_conferences

intelektual, ulama, dan media influencer yang dianggap mempunyai pendapat yang berlawanan terhadap kebijakan umum kerajaan Arab Saudi.

Menghilangnya Jamal Khashoggi justru terjadi ketika dia sedang dalam proses mengurus surat surat dokumen untuk melengkapi persyaratan pernikahannya dengan Hatice Cenghiz tunangannya saat kejadian tersebut terjadi. Pemerintah Arab Saudi melalui keterangan resmi yang disampaikan oleh kementerian Luar Negeri nya menyatakan bahwa Khashoggi sudah menyelesaikan proses perlengkapan surat dan dokumen yang diperlukannya dan mengkonfirmasi Khashoggi sudah keluar dari Kedubes Arab Saudi. Namun kecurgiaan muncul dari pernyataan ini karena menurut keterangan Hatice Cengiz tunangannya, dia tidak pernah keluar lagi dari Kedubes karena selama proses pengurusan dokumen menurut keterangan dari Cengiz yang masih tetap menunggu Khashoggi diluar kantor³.

Pada Tanggal 20 Oktober⁴, pemerintah Saudi secara resmi mengakui bahwa Khashoggi dibunuh di dalam Kedutaan Besar Arab Saudi di Istanbul dalam operasi intelijen yang tidak seharusnya terjadi dan tidak di bawah koordinasi Putra Mahkota Muhammad bin Salman. Bahkan dalam wawancaranya di CBS News dalam Acara 60 Minutes, MBS kembali menekankan bahwa dia tidak tau sama sekali tentang operasi intelijen pembunuhan Khashoggi di Kedubes Arab Saudi tersebut⁵, walaupun di awal tahun 2021 ini Badan Intelijen Amerika CIA telah merilis dokumen dan mengkonfirmasi Muhammad bin Salman telah menyetujui operasi penangkapan dan pembunuhan terhadap Jamal Khashoggi⁶.

Pembunuhan tragis ini telah menimbulkan protes dari kalangan internasional yang menuntut transparansi dalam pengusutan dan

³ Alpaslan Oguz, Edebalı Murat Akca and Muhammed Lütfi Turkcan, *Murder In Consulate The Killing of Jamal Khashoggi*, TRT World Research Centre, October, 2018, hal. 5

⁴ Turkcan, *Murder In*, October, 2018, hal. 5

⁵ Norah O'Donnell, 2019: MBS denies involvement in Khashoggi killing, but takes "full responsibility", *YouTube*, uploaded by 60 Minutes, 27 Feb. 2021, <https://www.youtube.com/watch?v=QvYDy9bH2CQ>, accessed 10 March 2021

⁶ Office of the Director of National Intelligence, *Assessing the Saudi Government's Role in the Killing of Jamal Khashoggi*, (Washington DC: Office of the Director of National Intelligence, 2021), hal. 2

investigasi kasus pembunuhan sadis ini. Yang terpenting setelah pengusutan pembunuhannya adalah menelusuri hal yang masih eksis dari gagasannya dan masih hidup dalam artikel-artikel terakhir yang ditulis di Koran Washington Post. Penelitian ini mencoba menganalisa poin-poin besar yang menjadi inti pembahasan dan fokus dari Khashoggi terhadap situasi dan keresahan yang dia alami selama masa pelarian politik di Amerika.

Profil Jamal Khashoggi

Jamal Khashoggi dilahirkan di Madinah pada tanggal 13 Oktober 1958⁷. Dia dibesarkan di tempat tinggalnya yang berdekatan dengan lingkungan pasar di sekitar Masjid Nabawi. Di tahun 1970 ketika Khashoggi beranjak tumbuh di masa remajanya, Arab Saudi sedang mengalami progres yang signifikan dalam ekonomi negara yang ditopang oleh cadangan sumber daya minyak yang luar biasa. Khashoggi melanjutkan pendidikan di universitas Indiana State pada jurusan administrasi bisnis dan menamatkan pendidikannya di universitas itu di tahun 1985. Tetapi setelah kuliah, dia justru memilih jalur jurnalistik sebagai karirnya dengan bekerja di Saudi Gazette, dan kemudian menjadi koresponden di surat kabar Middle East dan Arab News. Dia juga melanjutkan karirnya di jurnal Al Hayat sampai menjadi wakil editor di Koran Arab News sekitar akhir 90an, selanjutnya Dia menjabat sebagai deputy editor di surat kabar tersebut selama 4 tahun dan kemudian di tahun 2003 Khashoggi ditunjuk sebagai pemimpin redaksi di Koran Al Watan sebelum pada akhirnya diberhentikan tanpa alasan yang jelas dan kembali bertugas di kantor itu pada periode antara tahun 2007 sampai 2010⁸.

Di masa tugasnya di bidang jurnalistik, JK bertugas memberikan laporan dari hampir berbagai negara di Timur Tengah. Dari laporan langsung sebagai wartawan perang di Afghanistan sesaat setelah Uni

⁷ Jonathan Rugman, *The Killing In The Consulate*, (London: Simon Schuster, 2020), hal. 26

⁸ Ihab Omar, "Khashoggi's Death And Its Repercussions On The Saudi Position With Turkey", *ORSAM-Ortadoğu Araştırmaları Merkezi* 224 (2019), hal. 3

Soviet menginvasi negara tersebut di akhir tahun 1979, laporan dari Sudan, Aljazair, Lebanon, Kuwait, dan lain lain. Dalam masa penugasannya di Afghanistan, JK membangun relasi dengan salah satu pemimpin Mujahidin yang ikut bertempur melawan invasi Uni Soviet, Osama bin Laden. Kedekatan hubungan ini terus terbangun hingga keluarnya Soviet dari Afghanistan di awal tahun 1989. Sebagai salah satu orang non kerajaan yang berada di lingkaran kekuasaan di Arab Saudi, JK sempat dipercaya oleh Turki Al Faisal, Duta besar Arab Saudi untuk Inggris, dan menggunakan jasa Jamal Khashoggi sebagai juru bicaranya di London di tengah krisis hubungan antara Arab Saudi dan Amerika Serikat pasca serangan 9/11 dimana terdapat 15 pembajak di dalam pesawat yang ditabrak ke gedung WTC adalah berkewarganegaraan Arab Saudi.

Dalam perang Irak, Jamal Khashoggi ikut mendukung kebijakan invasi Amerika ini dan yakin Amerika sanggup memenangkan peperangan di Irak, tanpa perlu terpengaruh dengan kesalahan yang Amerika lakukan di Vietnam yang terbukti menjadi ladang pembantaian serdadu Amerika. Ketika revolusi Arab Spring atau Musim semi Arab, menjadi titik awal transformasi pemikiran Jamal Khashoggi yang pada dasarnya menginginkan kebebasan berpikir dan beropini. Keberhasilan Revolusi di Musim Semi Arab dalam menumbangkan diktator dan penguasa di beberapa negara arab seperti Tunisia, Aljazair, Mesir, dan Libya, semakin meyakinkannya saat itu sudah saatnya semua negara Arab berbenah dan menganut paham demokrasi yang lebih menampung aspirasi rakyat sebagai elemen penting dari terbentuknya sebuah negara. Namun utopia ini sedikit demi sedikit mulai pupus ketika presiden Muhammad Morsi, pemimpin pertama Mesir yang dipilih secara demokratis, digulingkan melalui kudeta militer yang ikut didanai oleh arab Saudi yang sudah jelas dari awal bersikap kontra terhadap arus revolusi ini karena dapat mengancam otoritas dan kekuasaan yang selama ini berada di tangan keluarga Saud. Ketika Khashoggi mulai terlihat kehilangan momen dalam mendorong kebebasan berekspresi sebagai nilai dari revolusi Musim Semi, pada tahun 2015 dia mengejutkan situasi dengan ditunjuk sebagai pengarah acara sebuah channel berita Al Arab yang berkantor di Bahrain dibiayai oleh anggota kerajaan yang demokratis Pangeran Al Waleed bin Talal. Di hari pertama diluncurkan, channel berita ini langsung membuat

gebrakan dengan mengundang salah seorang politisi Syiah dan mantan anggota dewan di Bahrain Khalid Al Marzooq. Akibatnya, siaran berita yang baru saja mengudara di hari pertama langsung ditutup dan berakhir di hari yang sama. Hal ini yang membuat Khashoggi semakin pesimis dengan harapan terjadinya reformasi di negaranya atau sekurang kurangnya dalam kebebasan beropini dan berekspresi terlebih dengan status Khashoggi sebagai jurnalis. Media sosial seperti *Twitter* menjadi platform yang cukup bisa menampung kegelisahannya dan menuangkan seluruh pemikirannya disana.

Kondisi semakin memburuk di Saudi ketika Muhammad bin Salman diangkat sebagai putra mahkota. Dia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Pengadilan Kerajaan sekaligus juga Menteri Pertahanan. Kebijakan kontroversialnya adalah melakukan invasi ke Yaman untuk menghancurkan pemberontak Syiah Houthi yang dapat mengancam integritas negara Arab Saudi. Jamal khashoggi mulai mengkritik kebijakan perang ini yang menyebabkan banyaknya korban sipil berjatuh dan bencana kelaparan dimana mana akibat blokade Saudi. Tindakan kritik ini langsung menuai akibatnya dengan sebuah pemanggilan dari kerajaan dan Khashoggi tidak lagi diperbolehkan untuk menulis di media, berbicara di forum forum publik, dan beraktivitas seperti jurnalis. Keadaan semakin memburuk dengan mulai adanya penangkapan terhadap aktivis, jurnalis, pengacara, dan ulama yang notabene berseberangan dengan opini kerajaan⁹. Khashoggi mengambil langkah cepat dengan memutuskan meninggalkan Arab Saudi dan tinggal di Amerika Serikat di ibukota Washington untuk menghindari potensi penangkapan yang dapat terjadi kapanpun kepadanya.

Setelah meninggalkan negaranya Saudi, Jamal khashoggi memantau dari luar setiap perkembangan situasi pemerintahan yang dijalankan di bawah kendali putra mahkota Muhammad bin Salman yang cenderung semakin represif dan terbukti selama beberapa bulan dalam pengasingan, JK melihat penangkapan masif dan pembredelan media yang

⁹ Simon Henderson, "Saudi Arabia's 'Anti-Corruption' Purge", *The Washington Institute*, November 6, 2017, accessed 4 Maret 2021, <https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/saudi-arabias-anti-corruption-purge>

mengharuskan mereka mengikuti narasi pemerintah. Pihak manapun yang berlawanan dengan opini resmi pemerintah langsung ditindak dalam bentuk penangkapan baik dari kalangan intelektual akademisi, jurnalis, ulama, dan media influencer yang memiliki kapasitas dalam memberikan pengaruh terhadap opini publik.

Pada titik ini, setelah beberapa bulan dalam hiatus, Khashoggi memutuskan untuk bersikap dan mulai kembali mengeluarkan ide, kritik, opini yang umumnya tertuju kepada setiap kebijakan Muhammad bin Salman sebagai pengendali kekuasaan di Arab Saudi. JK mulai bekerja di Washington Post sebagai kolumnis menerbitkan tulisan pertamanya di tahun 2017 dengan langsung mengkritisi kepemimpinan de facto MBS yang represif. Langkah ini terus dilakukan hingga Oktober 2018 oleh Khashoggi sebagai bagian dari kebebasan bersekpresi yang ironisnya tidak didapatkan Khashoggi di tanah air kelahirannya sendiri, Arab Saudi. Namun seperti yang diketahui publik internasional, langkah untuk menulis dan berbicara kembali terutama dalam mengkritisi kebijakan negaranya sendiri menjadi tumbal terhadap dirinya yang menjadi korban pembunuhan brutal di Istanbul di dalam kantor konsulat Saudi.

Jamal Khashoggi & Washington Post

Surat kabar atau koran Washington Post ini didirikan pada tahun 1877 oleh anggota dewan perwakilan dari Missouri yang bertujuan untuk mempromosikan partai Demokrat saat itu. Pada tahun 1933, pemilik modal Eugene Meyer membeli saham Washington post dalam pelelangan. Meyer memutuskan pada tahun 1946 untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pimpinan di Washington Post dan menyerahkan posisinya kepada menantunya sendiri, Philip graham yang ironisnya melakukan bunuh diri di tahun 196. Janda dari Graham, Katharine Meyer Graham, akhirnya melanjutkan tampuk kepemimpinan di Washington Post. Dilanjutkan oleh anaknya Donald graham pada tahun 1979¹⁰.

¹⁰ Delia Cabe and Kirsten Lundberg, *Covert Activity: the Washington Post, Edward Snowden and the National Security Agency*, Accessed March 5, 2021. https://ccnmtl.columbia.edu/projects/caseconsortium/casestudies/147/casestudy/www/layout/case_id_147

Salah satu periode yang paling menarik dari perjalanan Koran Washington Post adalah ketika Koran ini melakukan investigasi dan mengungkap salah satu skandal politik terbesar Amerika di era modern. Skandal ini sering disebut dengan Watergate dimana beberapa oknum dari Partai Republik di bawah kepemimpinan presiden Richard Nixon melakukan sabotase dan memata-matai dokumen-dokumen rahasia di kantor partai saingan dan oposisi pemerintah, Partai Demokrat. Operasi ini diketahui oleh tim keamanan Partai Demokrat dan esoknya pemberitaan ini menjadi gempar yang membuat Partai Republik menanggung malu dan berefek kepada citra kepemimpinan Richard Nixon. Hingga akhirnya kasus ini membuat Presiden Nixon mengundurkan diri sebagai bagian dari pertanggungjawabannya sebagai presiden dari Partai Republik dimana peristiwa penyusupan itu terjadi di bawah administrasi kepemimpinannya. Dua jurnalis penting yang mengulas secara detail tentang skandal Watergate ini adalah Carl Bernstein dan Bob Woodward yang terus menginvestigasi aktivitas ilegal yang dilakukan tim kampanye Nixon dari Partai Republik di apartemen Watergate tempat kantor Demokrat berpusat.

Dalam hal hubungan Washington Post dan Jamal Khashoggi, relasi ini terjalin erat sejak kepergian Jamal dari Saudi karena mulai terjadi pembungkaman terhadap dirinya secara langsung dari berbagai aktivitas jurnalistik karena kritiknya terhadap beberapa kebijakan Putra Mahkota Muhammad bin Salman terutama dalam hal perang di Yaman. 6 bulan hiatus di kota Washington tanpa ada aktivitas yang berarti, Jamal Khashoggi mulai bergerak dan menyuarakan isi pikirannya kembali, dipicu oleh semakin masifnya penangkapan para intelektual, ulama, pebisnis, dan anggota kerajaan tanpa ada transparansi hukum dan peradilan.

Jamal Khashoggi & Arab Saudi

Negara bekas pecahan dari kehilafan Turki Utsmani ini muncul ke permukaan di awal abad ke-20 tepatnya pada tanggal 23 September 1932¹¹. Negara dengan sistem monarki atau kerajaan didirikan oleh Raja

¹¹ Saudi Arabia, *Library of Congress – Federal Research Division*, September 2006, hal 1.

Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud. Kerajaan ini mulai mengalami pertumbuhan ekonomi dengan pesat berawal dari ditemukannya ladang minyak yang puluhan dekade ke depan menjadi tumpuan ekonomi negara dengan geografis padang pasir dan suhu panas yang tinggi ini.

Kemakmuran yang dicapai dalam bidang ekonomi juga mulai mempengaruhi pengaruh Saudi di kawasan baik secara politik maupun pertahanan. Amerika sebagai pemilik saham perusahaan minyak mayoritas menjadi sekutu dekat Saudi daaam menjalankan kepentingan di kawasan dan berlaku timbal balik dengan Amerika yang juga memiliki agenda politik dan kepentingan lainnya di kawasan timur tengah. Oleh karena itu tidaklah mengejutkan Arab Saudi menjadi salah satu tempat basis militer Amerika di Timur Tengah. Di sisi yang lain, Amerika juga menjadi importir terbesar minyak Saudi dengan keuntungan di pihak Amerika sebagai pengeksport alutsista pertahanan terbesar untuk Saudi.

Ketika situasi politik memanas di kawasan Timur Tengah terutama ketika pecahnya perang 6 hari antara Mesir-Suriah melawan Israel di tahun 1967 berlanjut dengan perang Yom Kipur di tahun 1973, Saudi cukup besar memiliki pengaruh dalam percaturan politik timur Tengah. Ketika Mesir di bawah Anwar Sadat dan Suriah di bawah Hafiz al Assad mulai terdesak oleh gempuran militer Israel, Saudi menjadi corong terdepan dalam menggalang anggota OPEC yang di dominasi negara-negara Arab penghasil minyak untuk mengembargo minyak sebagai jalan memutus pasokan distribusi minyak ke Amerika dan Eropa sebagai konsumen tetap Saudi, dan menyebabkan ekonomi dunia saat itu mengalami inflasi yang mengharuskan Amerika memaksa Israel untuk menghentikan laju militernya di lapangan. Saudi yang dipimpin oleh Raja Faisal berhasil menggunakan senjata ekonomi dalam merubuhkan arogansi Barat terhadap negara negara Timur Tengah terutama Israel yang harus menerima tingginya korban yang tewas di medan tempur. Sampai perdana menteri Israel saat itu Golda Mesir harus mengundurkan diri karena desakan rakyat Israel yang menuntut pertanggungjawaban pemerintah atas kegagalan mencegah serangan yang menjadi penyebab meletusnya perang Yom Kipur.

Di akhir 1970an, Saudi ikut mendanai dan membantu militer dan milisi Mujahidin yang sedang menghadapi perang besarnya melawan invasi

Uni Soviet. Saudi membentuk aliansi Saudi-Pakistan-Amerika bersatu dengan kepentingan yang sama yaitu mengeliminasi pengaruh komunisme di kawasan Timur Tengah. Jamal Khashoggi di era ini juga ikut terlibat sebagai wartawan perang yang meliput jalannya peperangan di Afghanistan dan untuk pertama kali bertemu dan menjalin relasi dengan salah satu pimpinan Mujahidin, Osama bin Laden. Jamal Khashoggi jelas memiliki koneksi dengan Arab Saudi sebagai orang lapangan yang melaporkan setiap kejadian dan progress di medan perang, tidak hanya untuk Saudi, tapi juga memberikan informasi yang menguntungkan dan strategis untuk Amerika dan Pakistan.

B. DISKUSI

Melalui pernyataan dan tulisannya, Jamal Khashoggi memiliki keresahan terhadap perkembangan demokrasi di negaranya Arab Saudi. Dia masih menaruh harapan adanya sedikit efek dari revolusi Musim Semi Arab agar dapat memberikan perkembangan positif bagi pemerintahan di negaranya untuk introspeksi dan berbenah dalam menjalankan sistem yang pada dasarnya otokrasi tapi minimal dapat dipoles dengan sentuhan demokrasi yang memberikan ruang bagi rakyatnya untuk ikut terlibat dan bersuara dalam proses pembangunan negara Saudi. Tapi sejak terpilihnya Muhammad bin Salman sebagai Putra mahkota melalui konsensus yang tidak transparan, pintu harapan itu sudah tertutup bagi Jamal dan rakyat Saudi secara keseluruhan dalam memiliki peluang untuk sedikit bisa bernafas di ruang yang lebih demokratis. Keberangkatannya ke Washington meninggalkan keluarga dan pekerjaannya merupakan ujian berat. Ditambah lagi beberapa bulan Khashoggi berdiam diri tanpa aktivitas berarti di Amerika, justru negaranya Saudi melakukan penangkapan besar-besaran terhadap banyak pihak dengan dalih korupsi dan aksi terorisme. Padahal notabene yang ditangkap adalah orang-orang yang mengkritisi kebijakan MBS yang terlalu utopis dan mengenyampingkan kerja kolektif dari para ahli di bidangnya yang bisa dimanfaatkan demi pembangunan Saudi. Jamal Khashoggi dalam pengasingan di Washington, akhirnya mulai kembali lagi ke dunia jurnalistik sebagai kolumnis di Koran Washington Post pada tahun 2017. Jumlah artikel yang ditulis dari 2017 sampai dengan akhir 2018 berjumlah 21 artikel. Ada banyak hal yang disampaikan

Khashoggi melalui tulisannya tersebut. Digarap dengan bebas, karena berada jauh dari ancaman dan tekanan langsung dari Saudi, karena hampir seluruh artikel nya di Washington Post merupakan kritik konstruktifnya terhadap kebijakan Saudi khususnya di bawah otoritas Putra mahkota Muhammad bin Salman. Dalam hal ini, penulis akan menjabarkan keseluruhan tulisannya di Washington Post dalam beberapa isu besar yang menjadi fokus penting menurut perspektif Khashoggi. Karena ini menjadi artikel-artikel terakhir yang ditulisnya sebelum pembunuhannya terjadi di bulan Oktober 2018. Jelas cara pandangnya disini lepas dari tekanan dan intimidasi dibandingkan jika Khashoggi masih berada di Saudi yang mengharuskan setiap warga negaranya mengikuti satu narasi, yaitu narasi kerjaan atau otoritas pemegang tampuk kekuasaan disana.

Jajaran artikel dari JK yang terbit di kolom Washington Post adalah sebagai berikut :

- Artikel dengan judul “Saudi Arabia wasn’t always this repressive. Now it’s unbearable.” Menjadi tulisannya pertama yang rilis di Washington Post pada tanggal 18 September 2017.
- Diikuti dengan tulisan ke-2 “Saudi Arabia’s crown prince wants to ‘crush extremists.’ But he’s punishing the wrong people” pada tanggal 1 November 2017
- Tulisan ke-3 berjudul “After more crackdowns, it’s clear Saudi Arabia’s Mohammed bin Salman is acting like Putin”rilis pada tanggal 6 November 2017
- Tulisan ke-4 berjudul “Saudi Arabia is creating a total mess in Lebanon” rilis pada tanggal 14 November 2017
- Tulisan ke-5 berjudul “Saudi Arabia has devastated Yemen — but a lesson from 1965 can help fix the mess” rilis pada tanggal 23 November 2017
- Tulisan ke-6 “With Ali Abdullah Saleh’s death, Saudi Arabia is paying the price for betraying Yemen” rilis pada tanggal 6 desember 2017
- Tulisan ke-7 berjudul “Saudi Arabia’s Mohammed Bin Salman has reason to worry about Iran’s protests” rilis pada tanggal 4 Januari 2018

- Tulisan ke-8 “What Saudi Arabia could learn from South Korea about fighting corruption” rilis pada tanggal 9 Januari 2018
- Tulisan ke-9 berjudul “Saudi Arabia’s crown prince already controlled the nation’s media. Now he’s squeezing it even further” rilis pada tanggal 8 Februari 2018
- Tulisan ke-10 berjudul “What Saudi Arabia crown prince Mohammed bin Salman can learn from Queen Elizabeth II” rilis pada tanggal 1 Maret 2018
- Tulisan ke-11 berjudul “Why Saudi Arabia’s crown prince should visit Detroit” rilis pada tanggal 21 maret 2018
- Tulisan ke-12 berjudul “By blaming 1979 for Saudi Arabia’s problems, the crown prince is peddling revisionist history” rilis pada tanggal 4 April 2018
- Tulisan ke-13 berjudul “What Saudi Arabia can learn from ‘Black Panther’ ” rilis pada tanggal 18 April 2018
- Tulisan ke-14 berjudul “After the latest wave of arrests, Saudi Arabia’s reformers now face a terrible choice” rilis pada tanggal 22 Mei 2018
- Tulisan ke-15 berjudul “What Trump gets right about Saudi Arabia and Iran” rilis pada tanggal 13 Juni 2018
- Tulisan ke-16 berjudul “Saudi Arabia’s women can finally drive. But the crown prince needs to do much more.” Rilis pada tanggal 26 Juni 2018
- Tulisan ke-17 berjudul “It’s time to divide Syria” rilis pada tanggal 4 Juli 2018
- Tulisan ke-18 berjudul “Saudi Arabia cannot afford to pick fights with Canada” rilis pada tanggal 8 Agustus 2018
- Tulisan ke-19 berjudul “The U.S. is wrong about the Muslim Brotherhood — and the Arab world is suffering for it” rilis pada tanggal 29 Agustus 2018
- Tulisan ke-20 berjudul “Saudi Arabia’s crown prince must restore dignity to his country — by ending Yemen’s cruel war” rilis pada tanggal 12 September 2018

- Tulisan ke-21 (terakhir) “What the Arab world needs most is free expression” rilis pada tanggal 18 Oktober 2018 atau berselang 16 hari sejak pembunuhannya terjadi pada tanggal 2 oktober 2018

Penangkapan secara massif terhadap kelompok kontra pemerintah Saudi

Dalam isu yang dibahas oleh Khashoggi tentang masalah penangkapan dan penahanan para oposisi pemerintah Saudi, ada 6 Artikel yang fokus membahas hal tersebut yaitu pada artikel:

- Saudi Arabia’s crown prince wants to ‘crush extremists.’
- Saudi Arabia wasn’t always this repressive. Now it’s unbearable.
- What Saudi Arabia crown prince Mohammed bin Salman can learn from Queen Elizabeth II
- Saudi Arabia’s crown prince already controlled the nation’s media. Now he’s squeezing it even further
- After the latest wave of arrests, Saudi Arabia's reformers now face a terrible choice
- Saudi Arabia cannot afford to pick fights with Canada

Ada banyak pihak yang menganggap Muhammad bin Salman yang diangkat sebagai Putra Mahkota suksesor kekuasaan Kerajaan Arab Saudi sebagai seorang reformis. Kinnamont dalam artikelnya mengatakan bahwa Muhammad bin Salman menginisiasi penghapusan larangan perempuan untuk mengemudi, penghapusan kewajiban bagi perempuan Saudi untuk harus didampingi oleh pendamping dari keluarga jika ingin bepergian¹², membangun bioskop, dan tempat hiburan lainnya termasuk memperbolehkan diadakannya konser-konser musik yang selama ini dilarang keras oleh pemegang otoritas sebelum pengangkatannya Muhammad bin Salman sebagai pewaris kerajaan¹³. Rencana pembangunan yang tertuang dalam Vision 2030¹⁴ seperti yang dijelaskan

¹² Liv Tønnessen, “Women’s Activism in Saudi Arabia”, *CHR Michelsen Institute* (2016), accessed 5 Maret, 2021, hal. 9

¹³ Jane Kinninmont, “Political Change in Saudi Arabia”, *Geographical Overview*, accessed 4 Maret, 2021

¹⁴ VISION 2030 Kingdom of Saudi Arabia, accessed 11 Maret, 2021, <https://vision2030.gov.sa/download/file/fid/417>, hal. 21

oleh Anthanasoulia¹⁵, menjadi plakat utama dalam mempromosikan ide dan visinya untuk mengubah wajah Saudi yang dianggap kaku dan konservatif menjadi negara yang lebih moderat dan terbuka dalam menyerap perkembangan teknologi yang cepat. Namun, segala retorika yang dibangun menjadi hambar ketika di saat yang sama ada banyak orang yang ditangkap hanya karena punya perspektif yang berbeda dengan rencana kebijakan pemerintah yang ambisius tersebut. Dalam situs majalah Time edisi 16 April 2018¹⁶, dijelaskan ada banyak penangkapan yang dilakukan terhadap para pengusaha, intelektual, aktivis HAM, dan yang paling mengejutkan adalah diantara yang ditahan, ada belasan anggota anggota kerajaan dan para menteri menterinya yang termasuk ikut di amankan dan di bawa ke hotel The Ritz Carlton untuk diinterogasi dengan tuduhan korupsi tanpa ada transparansi dalam proses peradilan. Untuk melegalkan proses penangkapan besar besaran ini, pemerintah Saudi menggunakan Undang Undang Hukum anti Kejahatan Cyber yang dalam implementasinya justru membidik para pengkritik yang memberikan opini yang konstruktif dan evaluatif. Di tahun 2017, seorang aktivis perdamaian ditangkap hanya karena men tweet di akun Twitter nya yang menuntut adanya kelonggaran dalam penggunaan internet yang selama ini terlalu disensor dengan ketat dan sangat mengekang dan juga memberikan pendapat tentang reformasi dalam sistem pemerintahan yang lebih konstitusional¹⁷. Frank Larue dalam laporan khususnya PBB mengatakan bahwa internet merupakan pemain kunci dimana setiap individu mengaplikasikan kebebasan berekspresi dalam menyampaikan ide dan gagasan¹⁸. Hal ini sangat penting dalam proses berdemokrasi dan

¹⁵ Stella Athanasoulia, "From 'Soft' to 'Hard' to 'Moderate': Islam in the Dilemmas of Post-2011 Saudi Foreign Policy", IREMAM, (2020), hal. 9

¹⁶ "The Saudi Crown Prince Thinks He Can Transform the Middle East. Should We Believe Him?", Time.com, Accessed 5 March, 2021 <https://time.com/longform/mohammed-bin-salman/>

¹⁷ "Saudi Arabia: Counter Terror Court Target Activist", *ABA Center for Human Rights*, (2019), hal. 10

¹⁸ Susan Park, "The United Nations Human Rights Council's Resolution on Protection of Freedom of Expression on the Internet as a First Step in Protecting Human Rights Online," *North Carolina Journal of International Law and Commercial Regulation* 4 (2013): 1131, accessed March 2, 2021, <https://core.ac.uk/download/pdf/151516557.pdf>

bernegara. Namun pada akhirnya dia dikenakan hukuman 14 tahun penjara diikuti dengan larangan bepergian ke luar negeri selama 14 tahun dan juga larangan mempublikasikan apapun bentuk cuitan dan tulisan di internet selama waktu yang tak terbatas. Hal ini yang menjadi duri dalam penegakan hukum di era Muhammad bin Salman yang justru menjadi bumerang yang dapat mengikis kepercayaan internasional terhadap niat baik reformasi yang selama ini didengungkan tapi justru di implementasikan dengan cara yang represif dengan membungkam suara suara alternatif. Dalam beberapa kasus, sejak Desember 2018, penangkapan dan penahanan terus dilakukan terhadap jurnalis, blogger, dan aktivis dengan alasan karena konten tulisan yang dirilis beberapa tahun sebelumnya kontra produktif terhadap pemerintah¹⁹.

Kebijakan ini jelas melanggar hak asasi manusia yang paling mendasar yaitu kebebasan untuk berbicara. Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, pada Artikel 19 dengan jelas memaparkan setiap orang mempunyai hak dalam menyampaikan aspirasi dan opini tanpa tekanan dan intimidasi dari pihak luar yang dapat mempengaruhi pendapatnya ke berbagai macam bentuk media dengan kepastian tidak ada pembatasan pembatasan yang mengubah objektivitas dari orang yang menyampaikan pemikirannya.

Kasus Korupsi di Saudi

Penyakit birokrasi seperti korupsi ini tidak luput dari pandangan kritik Khashoggi. Isu yang tabu bagi masyarakat Saudi untuk diangkat ke permukaan karena kasus korupsi yang dilakukan tidak hanya oleh jajaran menteri dan oknum pemerintah lainnya, tapi juga melibatkan anggota anggota kerajaan yang notabene sudah menjadi rahasia umum jika mereka punya akses langsung terhadap asset asset negara. Khashoggi menuangkan pandangannya soal ini dalam artikel :

- After more crackdowns, it's clear Saudi Arabia's Mohammed bin Salman is acting like Putin

¹⁹ “*Saudi Arabia Counter Terror Court Targets Activist*”, *American Bar Association*, April, 2019, accessed March 4, 2021, https://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/human_rights/justice-defenders/saudi-court-targets-activists.pdf

- Saudi Arabia's Mohammed Bin Salman has reason to worry about Iran's protests
- Saudi Arabia's crown prince already controlled the nation's media. Now he's squeezing it even further
- What Saudi Arabia could learn from South Korea about fighting corruption

Sejak Muhammad bin Salman ditetapkan sebagai Putra Mahkota melalui konsensus anggota kerajaan, hal pertama dari kebijakan yang bisa dilihat langsung implementasinya adalah pemberantasan korupsi. Belum pernah terjadi penangkapan dan penahanan anggota kerajaan dan pengusaha yang diduga terlibat korupsi begitu terbuka pemberitaannya kepada rakyat Saudi khususnya. Namun bisa dikatakan ini merupakan bagian dari visi reformasi yang ingin ditunjukkan oleh MBS kepada rakyatnya kalau dia sangat serius dalam mendobrak garis batas birokrasi yang selama ini tabu untuk diusik. Menurut Al Arabiya News Channel, pada tanggal 4 November ada sekitar 11 pangeran dan belasan mantan menteri menteri yang ditahan oleh Badan Anti Korupsi Saudi. Termasuk Badan ini kembali membuka dan melakukan investigasi yang lebih mendalam tentang kasus banjir besar di Jeddah pada tahun 2009 yang juga diduga akibat penyalahgunaan pembangunan drainase yang jauh dari spesifikasi yang seharusnya dibuat. Langkah pemberantasan ini juga mendapat dukungan ulama ulama Saudi yang menganggap ini sebagai langkah yang sesuai dengan perintah agama dalam memberantas kemungkaran seperti kasus korupsi.

Badan Anti Korupsi ini juga menangkap tidak kurang dari 17 pangeran lainnya dan pejabat pejabat senior termasuk Pangeran Alwaleed bin Talal, salah satu pengusaha terkaya di dunia yang memiliki aset 95 persen saham di Kingdom Holding yang turut berinvestasi di perusahaan perusahaan global internasional seperti Citigroup, Apple, Twitter, dan News Corporation. Tidak berhenti sampai disini, Pemerintah Saudi juga menangkap sekitar 8 pejabat lainnya dengan tuduhan yang sama, kasus korupsi. Orang orang seperti Bakr bin Laden, Saleh Kamal, dan Waleed Ibrahim termasuk di antara yang ditahan.

Proses jalannya ekonomi di Saudi khususnya penanaman modal dari luar negeri merupakan pintu terbukanya peluang untuk melakukan korupsi. Dalam hal ini, investor harus mempunyai koneksi dengan anggota kerajaan agar bisa berinvestasi supaya proses penanaman modalnya berjalan lancar. Kesepakatan kesepakatan antar dua pihak ini yang kurang transparan dalam memberikan laporan keuangan yang seharusnya dibuka ke khalayak umum karena menyangkut kepentingan negara dan rakyat Saudi²⁰. Tapi paktek ini sudah berjalan puluhan tahun sehingga menyuburkan praktek bisnis yang tidak transparan dalam mengelola dana investor. Disinilah bentuk suap menyuap dipraktekkan untuk mengakali hukum berbisnis yang berlaku di Arab Saudi demi keuntungan pribadi, baik dari sisi investor dan pihak penghubung yang biasanya berasal dari anggota kerajaan²¹.

Alshalan menggambarkan situasi dimana pengawasan negara lemah terhadap individu atau kelompok sosial tertentu dalam mengambil keuntungan dari transaksi yang illegal dalam birokrasi negara disebut dengan redistribusi korupsi²² seperti apa yang terjadi dalam fenomena bagi bagi kekuasaan di lingkaran elit Saudi.

Khashoggi menekankan dalam tulisannya perlu reformasi dalam birokrasi Saudi dan transparansi dalam pengelolaan dana negara termasuk aliran dana dari luar negeri dalam bentuk dana investasi yang selama berpuluh puluh tahun pengelolaannya menjadi kabur disebabkan oleh absennya laporan keuangan yang komprehensif sebagai bentuk akuntabilitas.

Invasi Saudi ke Yaman

Pada tahun 2015, Saudi melakukan invasi ke negara tetangganya di bagian selatan, Yaman²³. Kebijakan perang ini dilakukan karena

²⁰ Kaunain Rahman, "An overview of corruption and anti-corruption in Saudi Arabia", *Transparency International*, (2020), hal. 6

²¹ Simon Henderson, Saudi Arabia's 'Anti-Corruption' Purge, *The Washington Institute*, November 6, 2017, Accessed 4 March 2021

²² Abdulmajeed Alshalan, "Corrupt Practices in Saudi Arabia: An Analysis of the Legal and the Influence of Social Factors", (PhD diss., Indiana University, 2017) hal. 14

²³ Sumaya Almajdoub, "Saudi Arabia and the Regionalization of Yemen's Conflict", *George Washington University* (2016), hal. 1

kekhawatiran akan terjadinya efek domino dari revolusi Musim Semi di dunia Arab yang dapat mengancam keberlangsungan Kerajaan Saudi saat itu. Faktor yang lebih membuat Kerajaan gusar adalah berhasilnya pemberontak Houthi memegang kendali pemerintahan di Yaman yang ironisnya dari sudut pandang kepentingan Saudi, berafiliasi dan mendapat bantuan persenjataan dan moril dari negara musuh bebuyutan Saudi yaitu Republik Islam Iran. Selain dapat mengancam kedaulatan negara Saudi, adanya ancaman ideologis juga menjadi pertimbangan kebijakan invasi tidak dapat ditunda lagi. Ideologi disini yaitu perang poros ideologi antara Sunni yang diwakili oleh Saudi dan Syi'ah yang diwakili oleh Iran. Persaingan politik dan pengaruh antar dua kutub ideologi besar ini membuat Saudi khususnya bergerak cepat agar tidak bernasib sama seperti negara Arab lainnya yang sudah dalam pengaruh politik ekspansi ideologi Syi'ah seperti Irak, Lebanon dan Suriah²⁴. Apalagi Saudi masih memiliki penduduk yang berpaham Syi'ah walaupun hanya sebagai minoritas.

Namun invasi ini setelah berlangsung selama beberapa tahun, justru lebih banyak menimbulkan mudharat daripada keuntungan secara politik dan militer bagi Saudi. menurut laporan yang disampaikan oleh Human Right Watch awal tahun 2021, tidak kurang dari 18.400 warga sipil Yaman tewas dalam peperangan yang sudah berlangsung 6 tahun ini²⁵. Serangan udara militer koalisi Saudi dan blokade ekonomi yang diberlakukan tidak hanya berefek hingga merenggut belasan ribu korban jiwa tapi juga menciptakan krisis pangan dan bahan pokok kehidupan lainnya termasuk obat-obatan yang menyebabkan wabah kelaparan dan penyakit kolera yang berdampak ke 80 persen rakyat Yaman²⁶.

Krisis kemanusiaan di Yaman menurut laporan The Soufan Center dianggap sebagai krisis kemanusiaan terburuk di dunia saat ini²⁷. Melihat kenyataan di Yaman yang memilukan, Khashoggi mencoba mengambil nilai positif dari sejarah resolusi konflik yang pernah ditempuh oleh Raja

²⁴ Stella Athanasoulia, "From 'Soft' to.. (2020), hal. 2

²⁵ Human Right Watch, World Report 2021: Event of 2020 (2021), hal. 749

²⁶ Jeremy M. Sharp, Yemen: Civil War and Regional Intervention, *Congressional Research Service*, (2020), hal. 10

²⁷ The Forgotten War: The Ongoing Disaster In Yemen, *The Soufan Center* (2018), hal. 5

Faisal pada tahun 1965. Dalam tulisannya yang berjudul “Saudi Arabia has devastated Yemen - but a lesson from 1965 can help fix the mess”, Khashoggi menjabarkan tentang proses berlangsungnya perdamaian pada perang sipil di Yaman di tahun tersebut. Saudi mengambil langkah mundur dari keberpihakan pada salah satu pihak dan menjelma sebagai regulator dan tuan rumah bagi kedua pihak yang bertikai agar mau duduk bersama dan mencari jalan keluar untuk mengakhiri perang sipil. Proses ini berhasil dilakukan dan menghasilkan perdamaian di Yaman. Begitu juga apa yang terjadi saat ini di Yaman. MBS harus menurunkan egonya dalam hal ini untuk menghentikan atau sekurang kurangnya menurunkan frekuensi serangan dalam proses deeskalasi tensi permusuhan dengan mengaplikasikan proses perdamaian yang pernah dicapai oleh pendahulunya Raja Faisal yang berhasil menghentikan perang yang berlarut larut dan merugikan rakyat sipil Yaman secara keseluruhan.

Label Teroris untuk Ikhwanul Muslimin

Dinamika hubungan antara wilayah Saudi sekarang dan Ikhwanul Muslimin sudah terjadi sejak Hasan Al Banna mendirikan organisasi politik ini pada tahun 1928 dengan tujuan untuk mengembalikan semangat persatuan di antara umat Islam saat itu yang sudah tercabik-cabik disebabkan eksekusi dari kolonialisme dan munculnya nilai nasionalisme baru khususnya di kawasan timur tengah sebagai jaringan penting kekhilafahan Usmani. Dalam tulisan ini “By blaming 1979 for Saudi Arabia’s problems, the crown prince is peddling revisionist history” ada penjabaran yang menarik tentang relasi Saudi dan Ikhwanul Muslimin.

Kaum militer dan Ikhwanul Muslimin pernah berkoalisi dalam menumbangkan raja Farouk yang sudah keterlaluan dalam membina hubungan dengan Inggris seperti orang yang sedang terjangkit Stockholm Syndrome yang tidak bisa membedakan mana teman dan mana musuh sesungguhnya. Sehingga kudeta menjadi jalan yang ditempuh kedua pihak tersebut untuk mengakhiri kekuasaan Raja Farouk. Dalam perjalanan waktu ternyata dua pihak tidak mampu melanggengkan hubungan antara militer dan Ikhwanul Muslimin. Dianggap sebagai ancaman nasional karena pengaruh yang begitu mengakar pada masyarakat Mesir, dan berpotensi mengancam kepentingan militer, Gamal Abdul Nasser sebagai

pemimpin Mesir saat itu membubarkan organisasi ini dan menahan para senior senior penggerak Ikhwanul Muslimin. Sebagian yang tidak mampu bertahan di Mesir memutuskan keluar dari negaranya dan salah satu negara yang menampung pelarian politik ini adalah Saudi dibawah kepemimpinan Raja Faisal. Raja Faisal yang berpikiran progresif seperti mendapatkan aliansi baru karena pemahaman Islam yang dianut Ikhwanul Muslimin linear dengan visi Raja Faisal. Kehadiran Ikhwanul Muslimin memberi warna dalam pemahaman Islam yang selama ini begitu konservatif dan kaku di bawah Salafi Wahabi yang memutuskan hukum secara kaku dan berlawanan dengan ide dan gagasan Raja Faisal yang menginginkan adanya reformasi²⁸ khususnya dalam pendidikan yang dapat dijangkau oleh semua rakyat Saudi termasuk perempuan yang sebelumnya dilarang.

Namun arah perjalanan Saudi berubah total sejak pembunuhan Raja Faisal di tahun 1975 dan pemberontakan dan penguasaan Mesjidil haram oleh kelompok Juhayman Al Utaybi pada tahun 1979 yang memprotes kehidupan masyarakat Saudi yang sudah mulai meninggalkan ajaran Quran dan Sunnah menurut versinya²⁹. Namun kejadian itu sudah menjadi titik balik bagi Saudi untuk memperketat aturan pemerintah dalam kehidupan masyarakat Saudi ke nilai yang lebih konservatif dan tradisional di balik keadaan ekonomi yang sedang maju karena perdagangan minyak dunia. Ikhwanul Muslimin semakin terjepit ketika Saudi menganggap organisasi ini sebagai organisasi terlarang bahkan dianggap teroris³⁰.

Khashoggi menekankan reformasi dalam tulisannya “The U.S. is wrong about the Muslim Brotherhood -and the Arab world is suffering for it” dan menjadikan proses melegalkan Ikhwanul muslimin sebagai representasi faksi atau partai Islam sebagai bagian demokratisasi iklim politik di Saudi yang semakin represif di bawah MBS. Seharusnya keragaman cara dalam memahami Islam dan keterlibatan politik bagi rakyat merupakan hal yang tak terelakkan bagi institusi negara manapun

²⁸ Andrew Lipp, “The Muslim Brotherhood: Exploring divergent views in Saudi Arabia and Qatar”, (PhD diss., Iowa State University, 2019), hal. 17

²⁹ Andrew Lipp, “The Muslim Brotherhood, ...”, hal.17

³⁰ Andrew Lipp, “The Muslim Brotherhood, hal. 20

dalam melakukan reformasi. Termasuk keberadaan Ikhwanul Muslimin yang awalnya disambut baik sejak kedatangannya di era raja Faisal.

C. PENUTUP

Perubahan kekuasaan di Saudi di tahun 2015 merubah nasib Khashoggi secara drastis. Sesuatu yang tidak pernah dirasakan sebelumnya di era Raja Saudi sebelum Muhammad Bin Salman diputuskan oleh keluarga kerajaan sebagai Putra Mahkota pewaris tahta Kerajaan Saudi. Kebijakan kebijakan yang diputuskan oleh MBS dalam beberapa hal merupakan langkah progresif namun di sisi yang lain sangat represif dan ambisius.

Dalam pengasingannya di Amerika, Khashoggi memendam rasa kecewa yang sangat besar pada calon pemimpin Saudi di masa depan ini, MBS, dalam memberangus setiap phak yang memiliki pespektif dan penilaian yang berbeda dengan narasi pemerintah. Dimulai dengan penangkapan oposisi yang berkesinambungan sampai ke perang Yaman yang menjadi lumpur hisap bagi ekonomi dan citra politik Saudi di mata internasional.

Sebagai mantan orang lingkaran kekuasaan di periode 90an hingga pertengahan 2000an, Khashoggi yang pada dasarnya seorang yang nasionalis yang sangat mencintai negaranya Saudi harus dhadapkan dengan sebuah pilihan, apakah tunduk dan hidup nyaman dengan bersikap diam terhadap hal yang dianggapnya melenceng atau berdiri memberikan sikap objektif membawa prinsip yang jelas dengan bersuara memberikan kritik yang konstruktif terhadap kebijakan negaranya.

Periode 2017 sampai 2018 merupakan satu tahun terakhir bagi Khashoggi dalam hidupnya yang mayoritas tulisan tulisannya di tuangkan dalam kolom koran Washington Post. Dari 21 Artikel yang ditulis, hampir keseluruhannya membahas tentang isu-isu yang berhubungan dengan perkembangan politik di negaranya Saudi baik itu kebijakan di dalam maupun kebijakan di luar negeri. Dalam setiap tulisannya di Washington Post, Khashoggi selalu mendeskripsikan fokus permasalahan yang terlihat seperti benang kusut namun dia mampu menjelaskan dengan jelas kepada pembaca maksud dan poin yang ingin disampaikan. Poin poin besar yang menjadi fokus pembahasannya adalah isu kebebasan berekspresi dan

berbicara yang menjadi momok bagi pemerintah Saudi yang menganggap mereka yang berbeda narasi dengan pemerintah sebagai ancaman nasional dan dianggap sebaagai aksi terorisme yang berpotensi menciptakan situasi negara menjadi labil. Khashoggi berpendapat justru ini membuka diskursus yang dapat memberikan banyak alternative positif sebagai pertimbangan dalam mengambil kebijakan negara.

Di lain hal, keterlibatan rakyat juga ikut menjadi citra positif bagi usaha reformasi yang ingin diwujudkan oleh Putra Mahkota Muhammad Bin Salman sekaligus menjadi langkah populis untuk MBS sendiri di mata rakyat. Cohen-Almagor menekankan kebebasan dalam berbicara dan mengekspresikan pendapat merupakan hak fundamental paling mendasar pada setiap manusia dalam mengaktualisasikan kehormatan dan kesetaraan yang mencerminkan masyarakat yang berprinsip bebas dan demokratis³¹. Kebebasan berekspresi merupakan keniscayaan yang tidak mungkin disingkirkan di era masyarakat modern seperti saat ini³².

Dalam hal isu kemanusiaan juga Khashoggi melirik soal kebijakan perang Yaman yang sangat memperburuk keadaan bagi rakyat Yaman dan citra politik Saudi. Hal ini yang membuat Khashoggi kembali ke catatan masa lalu untuk mencari solusi terbaik menurutnya dalam menyelesaikan konflik di Yaman yang melibatkan Saudi negaranya dengan membahas formula yang dipakai Raja Faisal di tahun 1965 sebagai resolusi konflik dengan membawa dua pihak yang bertikai ke meja perundingan yang berhasil menghentikan perang saudara di Yaman saat itu. Hal ini yang disebut oleh Yassine Hamdan dan Pearson sebagai transformasi perubahan untuk pihak yang bertikai agar mau menyalurkan sengketa antara kedua belah pihak yang sebelumnya terbentur dalam peperangan beralih ke dalam proses yang lebih konstitusional di meja perundingan³³.

Di dalam negeri, selain isu penangkapan dalam konteks kebebasan berbicara, kasus korupsi memberikan gambaran betapa buruknya

³¹ Raphael Cohen-Almagor, "*Speech, Media, and Ethics*", (NewYork: Palgrave, 2001) hal. 4.

³² Ben Wagner, "Global Free Expression-Governing the Boundaries of Internet Content", (Springer, 2016), hal. 2

³³ Nahla Yassine Hamdane and Frederic S. Pearson, "*Arab Approaches to Conflict resolution*", (New York: Routledge, 2014). hal. 258

pengelolaan pemerintahan di level atas terutama lingkaran anggota kerajaan yang menumpuk kekayaan. Timpangnya antara dana investasi yang diterima dan dikelola oleh pemerintah dengan kualitas pembangunan di kota-kota di Saudi menunjukkan adanya kebocoran dalam pembangunan yang disebabkan perilaku korupsi yang sudah menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat Saudi. Khashoggi mengharapkan adanya transparansi dalam laporan keuangan dan supremasi hukum harus ditegakkan agar potensi pelanggaran dapat ditekan perkembangannya.

Khashoggi juga berharap agar stigma yang didapat Ikhwanul Muslimin dapat dipulihkan. Jelas ada kepentingan politik yang membuat Ikhwanul Muslimin dilabeli sebagai organisasi teroris. Melalui artikelnya, dijelaskan Saudi dapat menggunakan Ikhwanul Muslimin sebagai batu pijakan untuk menunjukkan pada dunia internasional, kalau Saudi sudah siap dalam menjajaki proses reformasi tidak hanya dalam pembangunan infrastruktur seperti Visi 2030 yang dicanangkan Muhammad Bin Salman, tetapi juga reformasi dalam politik yang selama ini mempunyai rapor merah ketika harus berhadapan dengan kata partai atau faksi Islam yang bersifat politis seperti Ikhwanul Muslimin. Ketika hal ini mau dicoba dan bisa berhasil dilaksanakan sebagai usaha reformasi di Saudi, maka ini adalah satu langkah maju dalam mewujudkan masyarakat dan pemerintahan yang lebih demokratis.

DAFTAR RUJUKAN

- Almagor, Raphael Cohen. *“Speech, Media, and Ethics”*, New York: Palgrave, 2001.
- Almajdoub, Sumaya. “Saudi Arabia and the Regionalization of Yemen’s Conflict”, *George Washington University* (2016) : 10-1. Accessed March 4, 2021.
- Alshalan, Abdulmajeed. “Corrupt Practices in Saudi Arabia: An Analysis of the Legal and the Influence of Social Factors”, PhD diss., Indiana University, 2017.
- Arabia, Saudi, *Library of Congress – Federal Research Division*, (2006) : 28-1. Accessed March 4, 2021.

- Athanasoulia, Stella. "From 'Soft' to 'Hard' to 'Moderate': Islam in the Dilemmas of Post-2011 Saudi Foreign Policy", IREMAM, (2020): 18-1. Accessed March 4, 2021.
- Cabe, Delia, and Kirsten Lundberg, *Covert Activity: the Washington Post, Edward Snowden and the National Security Agency*, Accessed March 5, 2021.
https://ccnmtl.columbia.edu/projects/caseconsortium/casestudies/147/casestudy/www/layout/case_id_147
- Haines, Avril. Office of the Director of National Intelligence, *Assessing the Saudi Government's Role in the Killing of Jamal Khashoggi*, Washington DC: Office of the Director of National Intelligence, (2021)
- Hamdane, Nahla Yassine and Frederic S. Pearson, *Arab Approaches to Conflict Resolution*, New York: Routledge, 2014.
- Henderson, Simon. "Saudi Arabia's 'Anti-Corruption' Purge", *The Washington Institute*, November 6, 2017
- Human Right Watch, *World Report 2021: Event of 2020 (2021) : 761-1*. Accessed March 4, 2021.
- Khashoggi, Jamal. "Saudi Arabia wasn't always this repressive. Now it's unbearable", *The Washington Post*, September 18, 2017. Accessed 4 February, 2021.
<https://www.washingtonpost.com/news/global-opinions/wp/2017/09/18/saudi-arabia-wasnt-always-this-repressive-now-its-unbearable/>.
- Khashoggi, Jamal. "Saudi Arabia's crown prince wants to 'crush extremists.' But he's punishing the wrong people", *The Washington Post*, November 1, 2017. Accessed 4 February, 2021, <https://www.washingtonpost.com/news/global-opinions/wp/2017/10/31/saudi-arabias-crown-prince-wants-to-crush-extremists-but-hes-punishing-the-wrong-people/>.
- Khashoggi, Jamal. "After more crackdowns, it's clear Saudi Arabia's Mohammed bin Salman is acting like Putin", *The Washington Post*, November 6, 2017. Accessed 4 February, 2021, <https://www.washingtonpost.com/news/global-opinions/wp/2017/11/06/saudi-arabias-mohammed-bin-salman-is-acting-like-putin/>.

opinions/wp/2017/11/05/saudi-arabias-crown-prince-is-acting-like-putin/.

Khashoggi, Jamal. "Saudi Arabia is creating a total mess in Lebanon", *The Washington Post*, November 14, 2017. Accessed 4 February, 2021, <https://www.washingtonpost.com/news/global-opinions/wp/2017/11/13/saudi-arabia-is-creating-a-total-mess-in-lebanon/>.

Khashoggi, Jamal. "Saudi Arabia has devastated Yemen — but a lesson from 1965 can help fix the mess", *The Washington Post*, November 23, 2017. Accessed 4 February, 2021, <https://www.washingtonpost.com/news/global-opinions/wp/2017/11/22/saudi-arabia-has-devastated-yemen-but-a-lesson-from-1965-can-help-fix-the-mess/>.

Khashoggi, Jamal. "With Ali Abdullah Saleh's death, Saudi Arabia is paying the price for betraying Yemen", *The Washington Post*, December 6, 2017. Accessed 4 February, 2021, <https://www.washingtonpost.com/news/global-opinions/wp/2017/12/05/with-ali-abdullah-salehs-death-saudi-arabia-is-paying-the-price-for-betraying-the-arab-spring/>.

Khashoggi, Jamal. "Saudi Arabia's Mohammed Bin Salman has reason to worry about Iran's protests", *The Washington Post*, January 4, 2018, Accessed 4 February, 2021, <https://www.washingtonpost.com/news/global-opinions/wp/2018/01/03/why-saudi-arabias-crown-prince-should-be-worried-about-irans-protests/>.

Khashoggi, Jamal. "What Saudi Arabia could learn from South Korea about fighting corruption", *The Washington Post*, January 9, 2018. Accessed 4 February, 2021, <https://www.washingtonpost.com/news/global-opinions/wp/2018/01/08/what-saudi-arabia-could-learn-from-south-korea-about-fighting-corruption/>.

Khashoggi, Jamal. "Saudi Arabia's crown prince already controlled the nation's media. Now he's squeezing it even further", *The Washington Post*, February 8, 2018. Accessed 4 February, 2021, <https://www.washingtonpost.com/news/global->

- opinions/wp/2018/02/07/saudi-arabias-crown-prince-already-controlled-the-nations-media-now-hes-squeezing-it-even-further/.
- Khashoggi, Jamal. "What Saudi Arabia crown prince Mohammed bin Salman can learn from Queen Elizabeth II", *The Washington Post*, March 1, 2018. Accessed 4 February, 2021, <https://www.washingtonpost.com/news/global-opinions/wp/2018/02/28/what-saudi-arabias-crown-prince-can-learn-from-queen-elizabeth-ii/>.
- Khashoggi, Jamal. "Why Saudi Arabia's crown prince should visit Detroit", *The Washington Post*, March 21, 2018. Accessed 4 February, 2021, <https://www.washingtonpost.com/news/global-opinions/wp/2018/03/20/why-saudi-arabias-crown-prince-should-visit-detroit/>.
- Khashoggi, Jamal. "By blaming 1979 for Saudi Arabia's problems, the crown prince is peddling revisionist history", *The Washington Post*, April 4, 2018. Accessed 4 February, 2021, <https://www.washingtonpost.com/news/global-opinions/wp/2018/04/03/by-blaming-1979-for-saudi-arabias-problems-the-crown-prince-is-peddling-revisionist-history/>.
- Khashoggi, Jamal. "What Saudi Arabia can learn from 'Black Panther' ", *The Washington Post*, March 18, 2018. Accessed 4 February, 2021, <https://www.washingtonpost.com/news/global-opinions/wp/2018/04/17/what-saudi-arabia-can-learn-from-black-panther/>.
- Khashoggi, Jamal. "After the latest wave of arrests, Saudi Arabia's reformers now face a terrible choice", *The Washington Post*, May 22, 2018. Accessed 4 February, 2021, <https://www.washingtonpost.com/news/global-opinions/wp/2018/05/21/saudi-arabias-reformers-now-face-a-terrible-choice/>.
- Khashoggi, Jamal. "What Trump gets right about Saudi Arabia and Iran", *The Washington Post*, June 1, 2018. Accessed 4 February, 2021, <https://www.washingtonpost.com/news/global-opinions/wp/2018/06/12/what-trump-gets-right-about-saudi-arabia-and-iran/>.

- Khashoggi, Jamal. "Saudi Arabia's women can finally drive. But the crown prince needs to do much more.", *The Washington Post*, June 26, 2018. Accessed 4 Februari, 2021, <https://www.washingtonpost.com/news/global-opinions/wp/2018/06/25/saudi-arabias-women-can-finally-drive-but-the-crown-prince-needs-to-do-much-more/>.
- Khashoggi, Jamal. "It's time to divide Syria", *The Washington Post*, July 4, 2018. Accessed 4 February, 2021, <https://www.washingtonpost.com/news/global-opinions/wp/2018/07/03/its-time-to-divide-syria/>.
- Khashoggi, Jamal. "Saudi Arabia cannot afford to pick fights with Canada", *The Washington Post*, August 8, 2018. Accessed 4 February, 2021, <https://www.washingtonpost.com/news/global-opinions/wp/2018/08/07/saudi-arabia-cannot-afford-to-pick-fights-with-canada/>
- Khashoggi, Jamal. "The U.S. is wrong about the Muslim Brotherhood — and the Arab world is suffering for it", *The Washington Post*, August 29, 2018. Accessed 4 February, 2021, <https://www.washingtonpost.com/news/global-opinions/wp/2018/08/28/the-u-s-is-wrong-about-the-muslim-brotherhood-and-the-arab-world-is-suffering-for-it/>.
- Khashoggi, Jamal. "Saudi Arabia's crown prince must restore dignity to his country — by ending Yemen's cruel war", *The Washington Post*, September 12, 2018. Accessed 4 February, 2021, <https://www.washingtonpost.com/news/global-opinions/wp/2018/09/11/saudi-arabias-crown-prince-must-restore-dignity-to-his-country-by-ending-yemens-cruel-war/>.
- Khashoggi, Jamal. "What the Arab world needs most is free expression", *The Washington Post*, October 18, 2018. Accessed 4 February, 2021, https://www.washingtonpost.com/opinions/global-opinions/jamal-khashoggi-what-the-arab-world-needs-most-is-free-expression/2018/10/17/adfc8c44-d21d-11e8-8c22-fa2ef74bd6d6_story.html.
- Kinninmont, Jane. "Political Change in Saudi Arabia", *Geographical Overview*. Accessed 4 Maret, 2021.

- Le Ruth, Phillippe and Anthony Bellanger. "International Federation of Journalists, International Press Centre," Brussels, Accessed March 3, 2021, https://www.ifj.org/fileadmin/user_upload/Draft_Convention_Journalists_E.pdf.
- Lipp, Andrew. "The Muslim Brotherhood: Exploring divergent views in Saudi Arabia and Qatar", PhD diss., Iowa State University, 2019.
- M. Sharp, Jeremy. "Yemen: Civil War and Regional Intervention." *Congressional Research Service* (2020) : 22-1. Accessed March 4, 2021.
- O'Donnell, Norah. 2019: MBS denies involvement in Khashoggi killing, but takes "full responsibility", *YouTube*, uploaded by 60 Minutes, 27 Feb. 2021, <https://www.youtube.com/watch?v=QvYDy9bH2CQ>. Accessed 10 March 2021.
- Oguz, Alpaslan, Edebali Murat Akca and Muhammed Lütfi Turkcan, *Murder In Consulate The Killing of Jamal Khashoggi*, TRT World Research Centre, October, (2018) : 22-1. Accessed March 4, 2021.
- Omar, Ihab "Khashoggi'Death And Its Repercussions On The Saudi Position With Turkey", *ORSAM-Ortadoğu Araştırmaları Merkezi* 224 (2019) : 16-1. Accessed March 4, 2021.
- Pauly, John J. "Is Journalism Interested in Resolution, or Only in Conflict?", *Marquette Law Review* 93 Issue 1: 13 (2009) : 23-7. Accessed February 3, 2021 http://scholarship.law.marquette.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1004&context=mulr_conferences.
- Park, Susan. "The United Nations Human Rights Council's Resolution on Protection of Freedom of Expression on the Internet as a First Step in Protecting Human Rights Online," *North Carolina Journal of International Law and Commercial Regulation* 4 (2013): 1131. Accessed March 2, 2021, <https://core.ac.uk/download/pdf/151516557.pdf>
- Rahman, Kaunain. "An overview of corruption and anti-corruption in Saudi Arabia", *Transparency International*, (2020) : 24-1. Accessed March 4, 2021.

- Rugman, Jonathan. *The Killing In The Consulate*, London: Simon Schuster, 2020.
- Saudi Arabia: Counter Terror Court Target Activist”, *ABA Center for Human Rights*, (2019) : 20-1. Accessed March 4, 2021.
- “The Forgotten War.” The Ongoing Disaster In Yemen”, *The Soufan Center* (2018) : 41-5. Accessed March 4, 2021.
- “The Saudi Crown Prince Thinks He Can Transform the Middle East. Should We Believe Him?”, *Time.com*, Accessed 5 March, 2021 <https://time.com/longform/mohammed-bin-salman/>
- Tønnessen, Liv. “Women’s Activism in Saudi Arabia”, *CHR Michelsen Institute* (2016) : 25-1. Accessed March 5, 2021.
- VISION 2030 Kingdom of Saudi Arabia. (2021) : 84-1. Accessed March 11, 2021.
- Wagner, Ben. *Global Free Expression-Governing the Boundaries of Internet Content*, Springer, 2016.